

# MELIHAT KE NEGERI TETANGGA: USAHA KECIL DI VIETNAM

Nurul Widyaningrum<sup>1</sup>

## Abstract

*The big economic reform conducted by the government of Vietnam in the 1980s, known as Doi Moi, transformed Vietnam from a socialist nation with a centralized economic system into a nation that implements free trade and reduce the state's control in the economy. From various literatures on economy development and small enterprises in Vietnam, this article attempts to look at the relation between Doi Moi with the development of small enterprises in Vietnam, the positions of small enterprises in the economic sector of Vietnam, several problems that are faced by small enterprises in Vietnam, and lessons that can be learned from our neighbor.*

## Pengantar: Mengapa Vietnam?

Pada dekade 1980, pemerintahan komunis Vietnam meluncurkan program reformasi ekonomi yang dikenal dengan nama *Doi Moi*, atau Kebijakan Renovasi. Reformasi ekonomi ini bertujuan mengurangi sebanyak mungkin kontrol pemerintah di dalam perekonomian, dan memberikan hak ba-

gi individu-individu di Vietnam untuk berpartisipasi di dalam kegiatan industri ringan.

Eksperimen Vietnam dengan ekonomi pasar bebas ini mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam. Pada periode 1990-an Vietnam mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi, yaitu sekitar 8,1% per tahun, dan angka pertum-

---

<sup>1</sup> Peneliti Senior Yayasan AKATIGA Pusat Analisis Sosial.

buhan ekspor tertinggi, yaitu 27,7%, melebihi angka pertumbuhan Cina pada masa yang sama (Thoburn 2004). Kebijakan *Doi Moi*, bersama-sama dengan kebijakan lain seperti *land reform*, dipandang berhasil menumbuhkan usaha kecil lokal di Vietnam. Saat ini sekitar 90% usaha yang bukan dikelola oleh negara termasuk di dalam usaha kecil koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha kecil memberikan kontribusi yang cukup penting bagi perekonomian dalam masa transisi seperti Vietnam.

Kasus Vietnam menarik untuk dilihat karena kasus ini menunjukkan perubahan yang drastis dari sistem ekonomi terpusat dari pemerintah komunis ke arah sistem ekonomi yang berorientasi pasar, dan perubahan ini dinilai telah mendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam. Selain itu, reformasi ekonomi itu juga dicirikan dengan tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah, yang menjadi gambaran hidupnya perekonomian Vietnam. Sejumlah tulisan berargumen bahwa maraknya sektor usaha kecil ini merupakan dampak dari kebijakan *Doi Moi* (yang membuka peluang kesempatan berusaha bagi penduduk Vietnam), sedangkan tulisan-tulisan yang lain melihat bahwa kebijakan *Doi Moi* ini lebih merupakan pengakuan pemerintah Vietnam akan keberadaan eko-

nomi pasar yang bertahan di bawah tekanan pemerintahan komunis dalam bentuk ekonomi informal.

Sejumlah tulisan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan tingginya penyerapan tenaga kerja. Menjamurnya usaha di Vietnam juga masih dibayangi oleh berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha, termasuk yang dihadapi oleh pengusaha kecil Vietnam.

Dirangkum dari berbagai sumber, tulisan ini mencoba menguraikan kondisi usaha kecil di Vietnam, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, peran dan upaya pemerintah Vietnam, serta pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia dari kasus Vietnam.

### **Strategi Pembangunan Vietnam**

Sebelum bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam, negara ini menjadi Vietnam Utara yang berhaluan sosialis-komunis dan Vietnam Selatan yang berorientasi pada pasar. Penduduk Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon (kemudian menjadi Ho Chi Minh) telah mengalami pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan Viet-

nam Utara. Pada masa perang Vietnam, ekonomi di Vietnam Selatan masih dapat bertahan cukup kuat dengan kehadiran militer Amerika Serikat yang ingin mencegah meluasnya paham komunis dari arah utara. Kontras dengan Vietnam Selatan, penduduk Vietnam Utara telah mengalami masa ekonomi terpusat sejak dua dekade sebelumnya, ditandai dengan pembatasan yang ketat terhadap usaha-usaha individu/swasta. Dana (1994) menunjukkan bahwa ketatnya larangan untuk berusaha bagi individu di Vietnam Utara telah memunculkan pasar gelap. Harga barang pasar gelap di sini jauh lebih tinggi dibandingkan harga resmi akibat kelangkaan komoditi.

Republik Sosialis Vietnam terbentuk pada tahun 1975, setahun setelah militer Amerika Serikat meninggalkan Vietnam Utara dan ditandai dengan jatuhnya Saigon. Perang Vietnam telah menghancurkan menghancurkan infrastruktur ekonomi, sosial, dan politik Vietnam, dan jutaan pengungsi meninggalkan negeri tersebut. Berdirinya Republik Sosialis Vietnam menandai perubahan sistem ekonomi di Vietnam Selatan yang tadinya merupakan ekonomi pasar ke arah sistem ekonomi terpusat yang didorong oleh pemerintah Vietnam Utara. Perubahan ini berdampak pada jatuhnya har-

ga produksi ternak dan beras di Vietnam Selatan (Dana 1994).

Pemerintah Vietnam kemudian meluncurkan kebijakan sosialis garis keras yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. Dalam rencana ini, seluruh kegiatan ekonomi Vietnam dipusatkan di tangan negara, termasuk "*collectivized*" unit-unit pertanian. Sektor perbankan dan perdagangan luar negeri dimonopoli oleh negara dan mekanisme pasar hanya boleh dijalankan di tingkat rumah tangga dan sektor usaha mikro (*petty-enterprises sector*) (Freeman 1996). Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menyebabkan rencana tersebut tidak berjalan (antara lain karena rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi dan transportasi akibat perang), pemerintah Vietnam terus menjalankan kebijakan ini. Program nasionalisasi berbagai perusahaan swasta, penyitaan aset lahan milik usaha swasta, peluncuran mata uang nasional, pembatasan jumlah uang yang bisa dimiliki oleh individu, dan pengubahan lahan-lahan pertanian individu menjadi lahan kolektif merupakan kebijakan-kebijakan yang dilancarkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Freeman 1996). Di tengah-tengah strategi yang bertujuan mematikan kegiatan ekonomi swasta ini, beberapa kelom-

pok ekonomi seperti sektor informal di Ho Chi Minh, para petani kecil di delta Mekong, daerah pertanian di luar Ho Chi Minh sebelumnya telah berhasil mengklaim hak kepemilikan mereka terhadap aset-aset yang mereka miliki, dan kelompok inilah yang mendorong tumbuhnya sektor usaha mikro ketika pemerintah meluncurkan *Doi Moi* (Freeman 1996).

Akan tetapi pada dekade 1980-an pemerintah Vietnam kemudian mulai meluncurkan berbagai program liberalisasi ekonomi. Dana (Dana 1999; 1994) menyebutkan bahwa liberalisasi ekonomi di Vietnam dimulai pada tahun 1981, dengan peluncuran Rencana Lima Tahun Ketiga (*Third Five-Year Plan*). Rencana pembangunan ini bertujuan untuk mendorong sektor industri, yang diwujudkan dalam *Three System Plan*:

- **Plan A:** Dalam skema ini perusahaan diharuskan untuk menggunakan *input* bahan baku yang disediakan oleh negara, dan menjual *output* mereka kepada negara dengan harga yang ditetapkan;
- **Plan B:** Dalam skema ini perusahaan dapat membeli bahan baku di tempat lain dan menjual produk mereka secara independen, dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh

dari penjualan ini digunakan untuk pembelian bahan baku tambahan;

- **Plan C:** Dalam skema ini pengusaha diizinkan untuk melakukan diversifikasi produk mereka dan menjual produk-produk "minor" mereka tanpa kontrol dari pemerintah.

(Dana 1994)

Pada tahun 1982, pemerintah Vietnam meluncurkan program orientasi ekonomi baru, yaitu mengalihkan fokus dari industri berat ke industri ringan, mengalihkan sumber daya ke sektor pertanian, serta mempromosikan ekspor.

Perubahan yang paling drastis terjadi ketika pemerintah Vietnam meluncurkan *Doi Moi*, atau *Renovation Policy*, pada tahun 1986. *Doi Moi* adalah reformasi ekonomi yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi kontrol negara di dalam kegiatan ekonomi. Warga Vietnam secara individu dapat mendirikan perusahaan di sektor industri ringan. *Doi Moi* diproyeksikan akan menggantikan paham komunisme dengan paham ekonomi pasar secara bertahap. Di dalam pendekatan ini, sektor swasta berfungsi sebagai *pelengkap* dari sektor milik negara, dan bukan sebagai *pengganti* (Dana 1999; Dana 1994).

Selanjutnya pada tahun 1989 pemerintah Vietnam mengeluarkan kebijakan yang memberikan hak bagi penduduk pedesaan untuk mengakses dan memiliki lahan serta hak untuk menjual produk mereka dengan harga pasar. Selanjutnya, hak atas lahan tersebut dapat diwariskan kepada keluarga mereka. Kebijakan ini mendorong generasi muda Vietnam untuk memasuki ekonomi pasar. Para generasi muda tersebut menyadari bahwa ekonomi pasar, melalui kewirausahaan serta sektor usaha swasta, merupakan cara tercepat untuk memperoleh manfaat yang ditawarkan oleh paham sosialisme (Dana 1994).

Pada tahun 1987 pemerintah Vietnam mengurangi hambatan perdagangan internal secara drastis dengan kebijakan yang memformalkan komersialisasi dan liberalisasi. Pemerintah tidak lagi terlibat di dalam kegiatan produksi dan distribusi, dan akses ke pasar luar negeri dibuka bagi perusahaan besar.

Periode tahun 1990-an ditandai dengan masuknya Vietnam ke pasar global. Pada periode ini, pemerintah Vietnam melonggarkan berbagai peraturan mengenai masuknya modal asing ke Vietnam. Negara ini mendapatkan manfaat dari adanya gelombang investasi asing yang masuk ke negara-

negara berkembang dan, selanjutnya, pada pertengahan periode 1990-an, diuntungkan dengan investasi langsung dari negara-negara Asia Tenggara yang lebih maju seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura (Freeman 2004).

Kecenderungan ini menurun pada paruh kedua 1990-an. Pada paruh ini, kecenderungan investor adalah mencari mitra lokal melalui akuisisi dan merger. Untuk itu investor asing mencari tempat-tempat dengan keunggulan pada *skill* di tingkat lokal, prasarana dan sarana, servis, jaringan *supply*, institusi yang kuat, serta hak atas kekayaan intelektual. Sementara hal ini masih kurang di Vietnam, karena dalam program *Doi Moi* ini ternyata Vietnam lebih mementingkan investasi asing dibandingkan mengembangkan kewirausahaan lokal (Freeman 2004).

FDI Vietnam berasal dari Asia, lebih dari 70% berasal dari Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Cina), dan ASEAN (20%). Alasan masuknya investasi ke Vietnam adalah faktor yang berkaitan dengan tenaga kerja (biaya, kualitas, kapabilitas, dan kemampuan bahasa) (Freeman 2004).

Bentuk kelonggaran-kelonggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Dana 1999):

- Pengusaha asing diperbolehkan memiliki 100% saham sebuah perusahaan di Vietnam.
- Diluncurkannya *Law of Foreign Investment* yang bertujuan untuk melindungi aset para pengusaha asing tersebut dari nasionalisasi.
- Perusahaan-perusahaan yang memaknai modal asing dibebaskan dari pajak pada tahun pertama mereka beroperasi. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing tersebut diperbolehkan mengirimkan keuntungan perusahaan mereka ke luar Vietnam, serta mengirimkan pembayaran ke luar negeri untuk keperluan pengembangan teknologi, jasa pelayanan, serta pembayaran pinjaman.

Berbagai kemudahan untuk modal asing tersebut kemudian diperkuat dengan peraturan perburuhan yang juga bertujuan untuk mendorong masuknya modal asing ke Vietnam. Pada tahun 1992, Kementerian Tenaga Kerja Vietnam meluncurkan kebijakan yang antara lain berisi penurunan batas upah minimum serta privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara (Dana 1999; Dana 1994).

## **Vietnam dan Pasar Global**

Sampai tahun 1990 Vietnam menghadapi embargo dari US, sehingga tidak dapat mengekspor ke US. Pada saat itu, untuk produk garmen banyak pengusaha Korea yang mengimpor dari Vietnam kemudian di Korea Selatan labelnya diganti dengan label Korea. Dihapuskannya embargo dari US pada tahun 2000, juga dibukanya pasar Uni Eropa, membuka peluang bagi ekspor Vietnam ke negara-negara tersebut (Dana 1999; Dana 1994; Nadvi and Thoburn 2004; Thoburn 2004). Pasar ekspor terbesar adalah Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Sedangkan negara-negara ASEAN adalah tujuan impor bahan baku Vietnam (Mirza and Giroud 2004)

Khusus untuk sektor garmen dan tekstil, yang merupakan salah satu sektor penting di Vietnam, ada empat tantangan yang akan dihadapi: dihapuskannya sistem kuota di dalam sistem perdagangan tekstil tingkat dunia, persaingan dari Cina, tuntutan untuk memenuhi standar perburuhan dan lingkungan, serta tuntutan dari pasar global akan produk yang murah, berkualitas tinggi, dan cepat. Kebanyakan produser di Vietnam, terutama perusahaan negara yang besar, diperkirakan mampu menghadapi tantangan tersebut, tetapi tidak bagi

perusahaan kecil (Nadvi and Thoburn 2004).

Berbagai strategi tersebut dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di Vietnam. Pada periode 1990-an, Vietnam mencapai tingkat pertumbuhan tertinggi, yaitu sekitar 8,1% per tahun, dan angka pertumbuhan ekspor tertinggi, yaitu 27,7%, melebihi angka pertumbuhan ekonomi Cina (Thoburn 2004).

### ***Doi Moi* dan Usaha Kecil Vietnam**

*Doi Moi* dianggap secara drastis mengubah struktur perekonomian Vietnam. Dana (1999) menyebutkan bahwa program ini kemudian mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di Vietnam, meliputi koperasi (yang kurang lebih berjumlah 1,500 unit), usaha milik keluarga, dan berbagai usaha milik swasta yang lepas dari kontrol negara. Selain itu, terdapat pula *joint-venture* antara perusahaan milik negara dan swasta.

Setelah *Doi Moi* diperkenalkan, di sektor pertanian unit rumah tangga yang kemudian menjadi basis ekonomi pertanian Vietnam, dan bukan koperasi. Pemberian hak pada penduduk pedesaan untuk memiliki aset tanah juga mendorong Vietnam yang sebe-

lumnya merupakan negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras ketiga di dunia (Hang 2003; Dana 1999).

Selain itu, penerapan *Doi Moi* juga mengubah posisi kalangan pengusaha di dalam struktur sosial masyarakat Vietnam. Sebelumnya, pengusaha menempati kedudukan yang rendah di dalam masyarakat Vietnam, di bawah golongan petani, kaum terpelajar, dan pekerja. Hal ini sebagian dikarenakan adanya anggapan bahwa kesuksesan di dunia usaha biasanya datang dari aktivitas ilegal. Akan tetapi kondisi itu telah berubah sejak diterapkannya *Doi Moi* (Hang 2003).

Akan tetapi berbeda dengan kedua penulis di atas, Freeman (1996) berpendapat bahwa menjamurnya UK Vietnam tidak diakibatkan oleh *Doi Moi*. UK di Vietnam, terutama sektor informal di kota Ho Chi Minh, merupakan sektor yang tumbuh dari besarnya kegiatan ekonomi yang beroperasi di luar kontrol pemerintah komunis. Sektor inilah yang menyediakan produk barang dan jasa utama yang dibutuhkan oleh penduduk Vietnam dan membuat Vietnam mampu bertahan. *Doi Moi* bertindak sebagai sinyal bahwa pemerintah Vietnam kemudian menerima kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta dan menjadikan

para pelaku ekonomi kecil itu sebagai model dan stimulus bagi para pelaku baru yang masuk setelah *Doi Moi* diterapkan.

### **Evolusi Sektor Informal Menuju Usaha Kecil: Ho Chi Minh**

Dana (1994) dan Freeman (1996) memberikan uraian yang hidup tentang semangat kewirausahaan dan ramainya kegiatan ekonomi skala kecil di Ho Chi Minh City. Dari kedua penulis tersebut kita dapat membayangkan bahwa kegiatan sektor informal dan usaha kecil di Ho Chi Minh, kota terbesar di Vietnam, mirip dengan keuletan pedagang asongan dan pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia dan, seperti di Jakarta atau Bandung, para pedagang-pedagang itu memenuhi jalan, trotoar, atau taman-taman kota (Freeman 1996). Berbagai produk tersedia di pasar-pasar dan kaki lima Ho Chi Minh. Pasar-pasar di Ho Chi Minh tersebut merupakan pasar permanen, yang beberapa di antaranya mengkhususkan diri untuk menjual produk-produk tertentu seperti pasar onderdil bekas atau pasar kerajinan kayu (Freeman 1996).

Di Ho Chi Minh City, jauh sebelum Vietnam dijajah Perancis, usaha kecil

dan pasar tradisional telah menjadi komponen penting dalam ekonomi regional Vietnam. Perdagangan secara ekstensif terjadi antara Vietnam dengan negara tetangga Cina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pemerintah kolonial Perancis berusaha menekan aktivitas sektor informal ini untuk dapat memasarkan produk-produk Perancis, akan tetapi, sebagaimana halnya semua kegiatan sektor informal di seluruh dunia, sektor informal di Vietnam juga berhasil menghindari tekanan pemerintah Perancis (Freeman 1996).

Ketika Ho Chi Minh jatuh ke tangan militer Vietnam Utara yang komunis, terjadi pengungsian besar-besaran dari kalangan bisnis dan pemimpin politik dan militer di Saigon. Pengungsian besar-besaran ini menyebabkan terjadinya *capital flight*, dan berbagai usaha skala menengah dan besar kemudian tidak beroperasi lagi. Hal ini menyebabkan penduduk Ho Chi Minh kemudian lebih mengandalkan kebutuhan sehari-hari mereka dari sektor informal.

Di bawah pemerintah komunis Vietnam Utara, kegiatan sektor informal di Ho Chi Minh City tetap berjalan—ditambah dengan pelaku-pelaku baru dari kalangan tentara Vietkong dan kader-kader partai komunis Vietnam



utara. Setelah reunifikasi Vietnam Utara dan Selatan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi yang terpusat di tangan negara, sektor informal di Ho Chi Minh terus berjalan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, banyak kalangan akademisi yang mengaitkan tumbuhnya 'kapitalisme jalanan' ini sebagai dampak dari *Doi Moi*. Dana, misalnya, berpendapat bahwa keberhasilan reformasi ekonomi ala *Doi Moi* ini adalah karena *Doi Moi* menempatkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan usaha swasta sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti dari ekonomi yang dijalankan oleh negara (Dana 1999; Dana 1994; Freeman 2004).

Akan tetapi Freeman berpendapat bahwa tumbuhnya sektor informal dan usaha kecil di Vietnam di Ho Chi Minh, berbeda dengan Hanoi, bukan merupakan dampak dari *Doi Moi*. Di Ho Chi Minh, di bawah pemerintahan komunis, usaha kecil tumbuh di bawah bayang-bayang sistem ekonomi yang terpusat. Ketika Ho Chi Minh berada di bawah pendudukan militer, sektor informal merupakan penyelamat ekonomi kota ini, antara lain melalui perdagangan barang-barang selundupan, melalui berbagai jaringan kredit informal.

Kegiatan sektor informal ini juga mendorong ekonomi Vietnam dalam periode ekonomi terpusat melalui hubungan timbal balik dengan sektor pertanian. Kegiatan perdagangan sektor informal menyebabkan stabilnya daya beli masyarakat perkotaan, yang pada gilirannya mendorong permintaan terhadap produk-produk pertanian dan nonpertanian dari pedesaan. Hal ini kemudian menyebabkan penduduk pedesaan mempunyai alternatif pendapatan di luar kegiatan pertanian (Freeman 1996).

Freeman juga menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi informal ini mempertahankan jiwa wiraswasta penduduk Vietnam Selatan dan menjaga infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendorong kembali usaha-usaha skala menengah dan besar ketika *Doi Moi* diluncurkan. Ketika modal asing mulai memasuki Vietnam, kelompok inilah yang kemudian berhasil menjalin kerjasama dengan modal asing.

*Doi Moi* kemudian menjadi pengakuan pemerintah Vietnam akan keberadaan sektor informal, yang pada akhirnya mengizinkan industri dan pedagang kecil beroperasi tanpa campur tangan pemerintah. Freeman (1996) berargumen bahwa tanpa ada akar yang kuat dari kelompok pelaku sektor informal, *Doi Moi* tidak akan ber-

hasil mendorong *boom* ekonomi Vietnam, dan bahkan mungkin akan menghasilkan *economic chaos* seperti yang terjadi di bekas negara Uni Soviet.

### **Kontribusi UK Sekarang**

#### ***Kontribusi dalam GDP***

Sakai dan Takada (2000) menyebutkan bahwa Ministry of Planning and Investment memperkirakan usaha nonnegara berkontribusi sebesar 24%, sementara statistik dari Departemen Statistik memperkirakan hanya 2% dari GDP.

#### ***Usaha kecil dan kesempatan kerja***

Angka pertumbuhan ekonomi di Vietnam yang tinggi ternyata tidak dibarengi dengan tumbuhnya angka penyerapan tenaga kerja. Bahkan pada periode 1990-an, percepatan pertumbuhan GDP dibarengi dengan penurunan tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja (Jenkins 2004). Penyerapan tenaga kerja tertinggi di periode ini terjadi pada sektor perdagangan dan jasa, dan terbesar pada jenis pekerjaan yang bergaji rendah atau pada sektor informal *self-employment* (ibid). Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidaklah mengherankan karena sektor ini merupakan sektor yang relatif mudah

untuk dimasuki. Sementara itu, sektor industri manufaktur merupakan sektor yang paling rendah pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya. Distorsi kebijakan (di dalam perdagangan, peranan usaha milik negara, dan kebijakan pasar tenaga kerja) dianggap sebagai faktor penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri ini (Jenkins 2004). Implikasi dari pandangan ini adalah usulan agar Vietnam meningkatkan liberalisasi ekonominya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Akan tetapi Jenkins berpendapat bahwa penurunan penyerapan tenaga kerja ini bukan sebagai akibat dari distorsi kebijakan, melainkan merupakan akibat dari meningkatnya efisiensi perusahaan-perusahaan industri manufaktur.

Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Chistensen dan Goedhuys (2004). Studi mereka tentang usaha kecil dan penyerapan tenaga kerja di 10 negara menunjukkan bahwa usaha mikro cenderung tinggi penyerapan tenaga kerjanya, akan tetapi penyerapan ini menurun ketika perusahaan-perusahaan tersebut membesar. Pada perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja mencapai 10 orang, angka pertumbuhannya menjadi negatif (Christensen and Goedhuys

2004). Meskipun demikian, dibandingkan dengan sembilan negara lain, tingkat pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di usaha-usaha kecil Vietnam relatif stabil, meskipun usaha-usaha tersebut telah memiliki jumlah pekerja lebih dari 10 orang (ibid).

### **Kendala yang Masih Dihadapi Usaha Kecil di Vietnam**

#### ***Permodalan***

Keberhasilan sektor informal untuk mendapatkan modal, di tengah hambatan yang sangat kuat dari bank-bank pemerintah untuk mendapatkan kredit, dimungkinkan dengan beroperasinya mekanisme kredit di dalam sektor informal itu sendiri (Freeman 1996). Terdapat tiga mekanisme perolehan modal:

- *Hui*, mirip dengan kelompok arisan di Indonesia
- “*Mattress banks*” (Freeman 1996)
- *Remittance* atau pengiriman uang dari kerabat yang tinggal di luar negeri

Pada tahun 1990, pemerintah Vietnam memberikan izin bagi pendirian bank-bank komersial, dan pada tahun 1992 jalan bagi perbankan asing untuk beroperasi di Vietnam terbuka. Dua bank asing pertama yang beroperasi di Vietnam adalah Banque In-

dosuez of France dan Bangkok Bank of Thailand yang membuka kantor mereka di Ho Chi Minh (Dana 1994). Sebelumnya, sektor perbankan milik negara hanya meminjamkan dana pada sektor-sektor usaha milik negara. Kondisi ini, ditambah dengan penguangan subsidi pada badan usaha milik negara, menurunkan efisiensi perusahaan-perusahaan tersebut.

Meskipun bank-bank swasta telah berdiri, kondisi ini tidak dengan sendirinya meningkatkan kemudahan usaha kecil untuk memperoleh tambahan modal. Hambatan dari sisi penyediaan jaminan kredit, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pengalaman pegawai-pegawai bank, menghambat akses usaha kecil terhadap kredit. Hal ini menyebabkan transaksi dalam bentuk uang tunai, meskipun dalam jumlah yang sangat besar, masih umum dijumpai di Vietnam (Dana 1999). Selain itu, batasan usaha kecil yang belum memadai menyebabkan banyak perusahaan besar mendapatkan kredit yang ditujukan bagi pengusaha kecil.

#### ***Infrastruktur fisik dan organisasi***

Perang saudara telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah di Vietnam. Hal itu menghambat proses komunikasi dan transportasi di Vietnam.

Dari sisi institusi, Vietnam masih membutuhkan institusi yang menjadi penengah di dalam konflik (Dana 1999).

### **Korupsi**

Dalam sebuah survei, sekitar 80% responden menyatakan bahwa birokrasi yang berbelit dan korupsi menjadi persoalan utama bagi dunia usaha di Vietnam (Tan dan Lim 1983, dalam Dana 1999). Hambatan ini muncul dalam bentuk kolusi dan nepotisme (pemerintah memprioritaskan kelompok tertentu), desentralisasi yang menyebabkan pemerintah di tingkat lokal lebih berkuasa dan lebih sulit untuk dikontrol, rendahnya gaji pegawai pemerintah yang menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan korupsi, serta masih belum jelasnya regulasi yang mengatur transaksi perdagangan (Venard 1998 dalam Dana 1999).

### **Perpajakan, regulasi, dan kebijakan**

Pengusaha di Vietnam mengeluhkan pajak yang dianggap berat, dan kontras dengan berbagai kemudahan pajak yang diberikan pada pengusaha dari luar Vietnam (Dana 1999). Usaha rumah tangga yang mendaftarkan usaha mereka secara formal wajib membayar pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam untuk mengurangi birokrasi adalah melalui penerapan *the Enterprise Law*, yang diluncurkan pada tahun 2000. Undang-undang ini bertujuan mengurangi proses yang harus dilalui pengusaha untuk mendaftarkan usahanya, dari 13 langkah menjadi tujuh langkah, dan dari 99 hari yang diperlukan untuk mengurus izin usaha menjadi 17 hari. Upaya ini juga diklaim menurunkan biaya pengurusan perijinan, dari US\$660 menjadi US\$30 (Christensen and Goedhuys 2004).

### **Entrepreneurship**

Hambatan internal yang dialami oleh pengusaha kecil di Vietnam meliputi kurangnya pengetahuan tentang detail-detail menjalankan usaha seperti pengetahuan tentang perbankan, asuransi, detail tentang pengiriman barang untuk ekspor, dan lain-lain (Hang 2003). Selain itu terdapat pula kendala di dalam pengembangan riset dan teknologi (Dana 1999). Sebagai misal, ketika Amerika Serikat masih menerapkan embargo terhadap produk tekstil dari Vietnam, pengusaha-pengusaha dari Korea Selatan menjadi "perantara" antara industri tekstil Vietnam dan pasar Amerika Serikat. Pengusaha Korea Selatan mengimpor tekstil dari Hanoi dan mengganti labelnya di Korea Selatan sebelum

mengeksportnya ke Amerika Serikat se-bagai produk “*made in South Korea*.” Ketika Amerika Serikat menghapus embargonya, pengusaha Vietnam dapat mengekspor langsung ke Amerika Serikat tetapi menghadapi kendala akibat kurangnya pengetahuan tentang ekspor impor.

### **Pasar**

Kebanyakan usaha kecil menjual produknya di pasar domestik. Kualitas produk yang dihasilkan pengusaha kecil pada umumnya rendah. Biaya produksi yang tinggi merupakan alasan rendahnya kompetisi perusahaan-perusahaan Vietnam. Selain itu, pasar lokal juga dipenuhi oleh barang-barang selundupan dari luar negeri, sehingga sulit untuk membangun pasar dalam skala nasional untuk produk-produk pengusaha kecil Vietnam (Hang 2003).

### **Penutup: Apa yang dapat Kita Pelajari dari Vietnam?**

Kasus Vietnam menunjukkan adanya peranan penting dari usaha kecil-mikro dalam sistem ekonomi yang mengalami transisi dari sistem ekonomi terpusat pada negara kepada sistem ekonomi pasar. Meskipun terdapat perdebatan tentang peran *Doi Moi* di

dalam pertumbuhan sektor swasta ini (yaitu, apakah *Doi Moi* mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil atau, sebaliknya, *Doi Moi* merupakan titik balik pengakuan pemerintah Vietnam akan adanya usaha-usaha pribadi yang beroperasi secara informal), sektor informal di Vietnam menjadi basis tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah di Vietnam, dan berperan penting di dalam mendorong ekonomi Vietnam menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tercepat di wilayah Asia. Meskipun demikian, pengamatan yang lebih dalam terhadap kondisi usaha kecil menunjukkan masih adanya kendala dan hambatan yang dialami usaha kecil, yang mungkin dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Di samping kendala-kendala “klasik” seperti akses terhadap sumber modal, hambatan juga muncul dari pendekatan pemerintah Vietnam terhadap usaha kecil. Dalam sistem ekonomi sosialis yang terpusat, usaha milik negara memonopoli kegiatan ekonomi, dan dengan demikian menghambat tumbuhnya sektor usaha kecil. Dalam sistem ekonomi pasar yang diterapkan sekarang, pemerintah Vietnam dinilai lebih memberikan kemudahan terhadap pengusaha asing dibandingkan dengan pengusaha lokal.



## REFERENSI

- Christensen, Jens Dyring, and Micheline Goedhuys. 2004. "Impact of National Policy and Legal Environments on Employment Growth and Investment in Micro and Small Enterprises." In *Series on Conducive Policy Environment for Small Enterprise Employment*, 64 pages, ix. Geneva: International Labour Office.
- Dana, Leo Paul. 1999. *Entrepreneurship in Pacific Asia: Past, Present & Future*. Singapore; River Edge, N.J.: World Scientific.
- . 1994. "A Marxist Mini-Dragon? Entrepreneurship in Today's Vietnam." *Journal of Small Business Management* 32(2):95—102.
- Freeman, Donald B. 1996. "Doi Moi Policy and the Small-Enterprise Boom in Ho Chi Minh City, Vietnam." *Geographical Review* 86(2):178—97.
- Freeman, Nick J. 2004. "Harnessing Foreign Direct Investment for Economic Development and Poverty Reduction: Lessons from Vietnam." *Journal of the Asia Pacific Economy* 9(2):209—22.
- Hang, Pham Thi Thu. 2003. "Creating a Conducive Policy Environment for Employment Creation in Small Enterprises in Viet Nam." In *Series on Conducive Policy Environment for Small Enterprise Employment*. Geneva: International Labour Office.
- Jenkins, Rhys. 2004. "Why Has Employment Not Grown More Quickly in Vietnam?" *Journal of the Asia Pacific Economy* 9(2):191—208.
- Mirza, Hafiz, and Axele Giroud. 2004. "Regionalization, Foreign Direct Investment, and Poverty Reduction." *Journal of the Asia Pacific Economy* 9(2):223—48.

- Nadvi, Khalid, and John Thoburn. 2004. "Challenges to Vietnamese Firms in the World Garment and Textile Value Chain, and the Implications for Alleviating Poverty." *Journal of the Asia Pacific Economy* 9(2):249–67.
- Sakai, Hitoshi, and Nobuaki Takada. 2000. "Developing Small and Medium-Scale Enterprises in Vietnam." In *NRI Papers No. 13*: Nomura Research Institute.
- Thoburn, John. 2004. "Globalization and Poverty in Vietnam." *Journal of the Asia Pacific Economy* 9(2):127–44.

